

2011

LAPORAN DELEGASI DPR RI  
ANNUAL 2011 SESSION OF THE  
PARLIAMENTARY CONFERENCE ON THE  
WORLD TRADE ORGANIZATION

JENEWA, 21 – 22 MARET 2011

BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN  
2011





**LAPORAN DELEGASI DPR RI  
KE ANNUAL 2011 SESSION OF THE PARLIAMENTARY CONFERENCE ON THE  
WORLD TRADE ORGANIZATION  
JENEWA, 21 – 22 MARET 2011**

---

## **PENDAHULUAN**

1. Konferensi Tahunan Antar Anggota parlemen Dunia mengenai WTO Tahun 2011 (*Annual 2011 Session of the Parliamentary Conference on WTO*) telah dilaksanakan pada tanggal 21 – 22 Maret 2011 di Kantor WTO Jenewa. Pertemuan dihadiri oleh 200 peserta yang mewakili 67 parlemen negara anggota dan peninjau. Delegasi DPR RI terdiri dari:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) Bapak Ir. Satya W. Yudha, M.Sc (F-PG/Komisi VII) | Ketua Delegasi   |
| 2) Bapak Ramadhan Pohan (F-PD/Komisi I)             | Anggota Delegasi |
| 3) Bapak Ir. Arif Budimanta (F-PDIP/Komisi XI)      | Anggota Delegasi |
- serta unsur PTRI Jenewa sebagai advisor.

Pertemuan ini dimaksudkan sebagai wahana untuk meningkatkan pemahaman anggota parlemen mengenai perkembangan terkini perundingan Putaran Doha, sehingga dapat menjelaskan kepada konstituennya mengenai pentingnya Agenda Doha dan mendorong pemerintahnya masing-masing untuk menyelesaikan perundingan.

## **JALANNYA PERSIDANGAN**

2. Anggota IPU Executive Committee, Mr. Donald H. Oliver, dalam pidato pembukaannya menyatakan rasa terima kasihnya kepada Direktur Jenderal WTO, dimana WTO telah menunjukkan niat baiknya untuk membuka jalan untuk diskusi antara parlemen dengan para negosiator. Beliau menekankan bahwa sangat penting membina hubungan dengan konstituen sendiri mengenai isu-isu perdagangan dan menyambut hangat partisipasi aktif negara-negara berkembang dalam konferensi tersebut, dimana hal ini menunjukkan bahwa negara-negara berkembang akan mengambil manfaat dari kesepakatan perdagangan global ini.
3. *Annual 2011 Session of the Parliamentary Conference on WTO* membahas 4 (empat) agenda yaitu:
  - a. *Multilateralism in the midst of the rising tide of bilateral and regional trade pacts*
  - b. *Rebalancing the rules of the multilateral trading system in favour of the poor*

c. *Trade and Sustainable Development : from Collision to Cohesion*

d. *Connecting to Society : Trade Policy-making in the Era of mass Communication*

4. Terkait dengan agenda **a**, pertemuan membahas mengenai hubungan sistem perdagangan multilateral dan persetujuan perdagangan regional (*Regional Trade Arrangement – RTA*) dan persetujuan perdagangan bilateral (*Bilateral Trade Arrangement – BTA*). Secara umum para delegasi mengharapkan agar RTA dan BTA dapat saling melengkapi untuk mendukung (*building block*) pengembangan sistem perdagangan multilateral. Untuk itu, perlu dilakukan upaya harmonisasi provisi dalam RTA/BTA agar tidak bertentangan dengan sistem yang berlaku di WTO.
5. Dalam intervensinya, Delegasi yang diwakili oleh Bapak Ir. Satya W. Yudha, M.Sc menyampaikan : **Pertama**, mendukung agar segera diselesaikan Putaran Doha yang mana kita mengetahui bahwa kelambanan penyelesaian dikarenakan negara Amerika yang belum bersepakat. Untuk itu Anggota parlemen IPU diharapkan untuk ikut mendesak secara aktif masing-masing negara anggota IPU dalam penyelesaian Putaran Doha tersebut. Yang **kedua**, bahwa RTA/BTA merupakan suatu hal yang tidak terelakkan karena didorong oleh kepentingan politik, ekonomi dan geografis. Kecenderungan munculnya RTA juga disebabkan oleh lambannya proses perundingan multilateral. Untuk itu, perlu dilakukan *assessment* atas kompatibilitas RTA dengan sistem perdagangan dibawah WTO. WTO diharapkan mampu meningkatkan peran *monitoring*-nya sehingga RTA/BTA tersebut dapat mendorong pengembangan dan implementasi sistem perdagangan multilateral.
6. Agenda **b**, membahas mengenai perlunya perundingan Doha memperhatikan kepentingan serta kebutuhan negara berkembang dan negara miskin. Untuk itu, perlu diupayakan peningkatan *level of playing field* (kemampuan yang sejajar) sehingga dapat mendorong terciptanya sistem perdagangan yang adil dan memenuhi kebutuhan pembangunan semua anggotanya.
7. Delegasi DPR RI yang diwakili Bapak Ir. Arif Budimanta, menyampaikan intervensi bahwa ketidakseimbangan dalam perdagangan global (*global trade imbalances*) yang kurang berpihak pada negara berkembang bukan saja menyebabkan kerugian ekonomi, namun juga berimplikasi pada timbulnya keresahan politik dan sosial. Berbagai kerusuhan di negara-negara di wilayah Afrika dipicu oleh kesulitan untuk memperoleh bahan pangan. Untuk itu, prinsip Perlakuan Khusus dan Berbeda (*Special and Differential Treatment*) dalam bentuk perbedaan implementasi tingkat pemotongan tariff produk pertanian dan non pertanian, skema SP (*Special Products*), *Special Safeguard Mechanism* (SSM) serta bantuan pengembangan kapasitas dan teknis perlu ditegakkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perundingan Doha. Pengembangan kerjasama terkait *Aids for Trade* juga perlu terus ditingkatkan.
8. Dalam agenda **c**, telah dilakukan dialog interaktif antara *Senior WTO Negotiators* dengan anggota parlemen terkait *Trade and Sustainable Development*. Para Ketua Sektor Runding juga telah menyampaikan update state of play negosiasi di masing-

masing sektor dan bagaimana masing-masing sektor tersebut dapat berkontribusi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

9. Dalam agenda d, pertemuan membahas mengenai peran media dalam membantu meningkatkan profil dan mendekatkan WTO dengan rakyat negara anggota. Hal ini penting mengingat berbagai keputusan yang diambil WTO pada akhirnya akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Masyarakat yang memahami WTO dan manfaat sistem perdagangan multilateral diharapkan dapat memberikan dorongan kepada pemerintahnya masing-masing untuk memenuhi komitmennya dalam perdagangan multilateral termasuk menyelesaikan perundingan Putaran Doha.
10. Dalam intervensinya yang diwakili oleh Bapak Ramadhan Pohan, Indonesia menyampaikan mengenai pentingnya peningkatan keterlibatan semua stakeholder dalam perumusan kebijakan perdagangan internasional sehingga setiap kebijakan perdagangan dapat dipertanggungjawabkan. Penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan perdagangan internasional perlu terus ditingkatkan. Dalam kaitan tersebut, media memainkan peran dalam menegakkan prinsip tersebut serta memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai manfaat dan implikasi sistem perdagangan internasional di WTO.
11. Dalam pertemuan tersebut Delegasi diberikan kesempatan untuk melakukan Dengar Pendapat (*Hearing*) dengan Direktur Jenderal WTO, Pascal Lamy. Hal-hal yang mengemuka selama Dengar Pendapat tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Ketua masing-masing sektor perundingan perlu mengeluarkan draft *revised text* sebelum Paskah. Draft revisi tersebut merupakan bentuk transparansi atas *remaining gaps* di berbagai isu runding sehingga memungkinkan dilakukan proses horizontal dalam bentuk *take and give*;
  - b. Perundingan Doha bukan hanya terkait dengan isu pembukaan akses pasar, namun juga terkait dengan pembangunan *rule-based system* perdagangan dunia;
  - c. Beberapa anggota parlemen menekankan mengenai perlunya meningkatkan *level of ambition* di sektor pertanian untuk membantu meningkatkan *level of playing field* negara-negara berkembang di perdagangan dunia;
  - d. Dirjen WTO menandakan bahwa Perundingan Doha tidak akan bisa diselesaikan tanpa keterlibatan dan dukungan eksplisit anggota parlemen. Untuk itu, Dirjen WTO mengharapkan masing-masing anggota parlemen berbicara dan mendorong pemerintah masing-masing untuk menyelesaikan perundingan Putaran Doha. Komitmen politik disampaikan dalam pertemuan G-20 dan APEC nampaknya belum bisa diterjemahkan dalam bentuk pencapaian titik temu oleh *key players* di berbagai isu runding.
12. Pertemuan WTO menghasilkan *Outcome Document* dengan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut:
  - Mendukung penyelesaian perundingan Putaran Doha pada akhir tahun 2011;

- Perlunya perundingan memperhatikan *special differential treatment*, pemberian bantuan pengembangan kapasitas dan bantuan teknis bagi negara berkembang, SVE (*Small and Vulnerable Economies*) dan LDCs;
- Perlunya memberikan *duty free quota free market access* bagi LDC;
- Perlunya koherensi berbagai kebijakan WTO dengan organisasi internasional lainnya guna mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan;
- Meningkatkan peran serta parlemen dalam melakukan *oversight* berbagai negosiasi perdagangan internasional

#### **CATATAN :**

13. Konferensi Tahunan Antar Anggota Parlemen Dunia mengenai WTO telah berlangsung lancar. Pertemuan merupakan salah satu upaya meningkatkan transparansi dalam sistem perdagangan internasional khususnya WTO. Pemahaman anggota parlemen dalam proses maupun isu perundingan Doha diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dukungan politik kepada para negosiator dalam menembus kebuntuan di berbagai sektor runding.
14. Delegasi DPR RI telah berpartisipasi aktif dalam pembahasan pada semua agenda diskusi pertemuan. Delegasi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh Dewan untuk melaksanakan tugas ini. Semoga dapat bermanfaat.

Jakarta, 31 Maret 2011

a.n. Delegasi DPR-RI



**Ir. Satya W. Yudha, M.Sc**

Ketua Delegasi